

BAB. 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1 Kesimpulan

Berikut adalah hasil penilaian keandalan sistem keselamatan kebakaran bangunan dan manajemen penanggulangan kebakaran pada gedung kemuning RSUD dr.Adnaan, WD Kota Payakumbuh, Gedung kantor balaikota Payakumbuh, dan Gedung OPD Dinas Pemda Kota Payakumbuh:

1. Tingkat keandalan sistem proteksi kebakaran bangunan gedung kemuning RSUD dr.Adnaan, WD kota Payakumbuh terhadap bahaya kebakaran secara keseluruhan berada dalam kondisi baik (B) dengan NKSKB (Nilai Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan) 81,81%.
2. Tingkat keandalan sistem proteksi kebakaran bangunan untuk gedung Balaikota Payakumbuh secara keseluruhan berada dalam kondisi cukup (C) yaitu dengan NKSKB 68,05%.
3. Tingkat keandalan sistem proteksi kebakaran bangunan untuk gedung OPD Dinas Pemda Kota Payakumbuh berada dalam kondisi kurang (K) dengan hasil NKSKB 59,19%.
4. Manajemen proteksi kebakaran pada gedung kemuning RSUD dr.Adnaan, WD Kota Payakumbuh memiliki tingkat kesesuaian 93,75 % dengan Permen PU No.20/PRT/M/2009 yaitu dalam kategori baik dimana secara keseluruhan gedung ini telah memiliki manajemen penanggulangan bahaya kebakaran yang baik, namun untuk gedung Balaikota dan gedung OPD Dinas Pemda Kota Payakumbuh memiliki tingkat kesesuaian sama-sama 0% terhadap Permen PU No.20/PRT/M/2009 karena kedua gedung ini tidak memiliki manajemen proteksi kebakaran sama sekali.
5. Perbandingan tingkat keandalan sistem keselamatan bangunan di gedung kemuning RSUD dr.Adnaan, WD kota Payakumbuh yaitu dengan nilai keandalan bangunan 81,81 % dalam kategori baik, kemudian gedung Balaikota Payakumbuh mendapatkan nilai keandalan bangunan 68,05% termasuk dalam kategori cukup (C) dan gedung OPD Dinas Pemda Kota Payakumbuh mendapatkan nilai keandalan bangunan 59,19% termasuk

dalam kategori kurang (K). Terdapat perbedaan signifikan pada komponen sistem proteksi aktif pada tiap gedung. Gedung kemuning mendapatkan nilai kondisi 17,04%, gedung kantor balaikota 10,14% dan gedung OPD mendapatkan nilai kondisi terendah yaitu 2,93% karena tidak ketersediaan sebagian besar sub komponen sistem proteksi aktif.

6. Perbandingan tingkat kesesuaian manajemen proteksi kebakaran pada gedung kemuning RSUD dr.Adnaan, WD kota Payakumbuh, gedung Balaikota Payakumbuh, Gedung OPD Dinas Pemda Kota Payakumbuh sangat signifikan karena untuk tingkat kesesuaian manajemen proteksi kebakaran terhadap Permen PU No.20/PRT/M/2009 pada gedung kemuning RSUD dr.Adnaan, WD mendekati nilai sempurna yaitu 93,75% karena telah memiliki manajemen yang bagus, baik itu tingkat kesesuaian prosedur tanggap darurat, organisasi proteksi kebakaran, dan sumber daya manusia. Sementara pada gedung kantor balaikota dan gedung kantor OPD memiliki tingkat kesesuaian 0% karena kedua gedung ini tidak memiliki manajemen proteksi kebakaran sama sekali baik itu prosedur tanggap darurat, organisasi proteksi kebakaran maupun sumber daya manusia.
7. Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan pada gedung kemuning RSUD dr.Adnaan, WD kota Payakumbuh bahwa ada beberapa sub komponen pada sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif yang harus dilengkapi oleh pengelola gedung untuk memenuhi nilai keandalan sistem keselamatan bangunan menjadi sempurna serta melengkapi kesesuaian manajemen proteksi kebakaran gedung terhadap Permen PU No.20/PRT/M/2009. Selanjutnya untuk gedung kantor Balaikota Payakumbuh dengan nilai kondisi cukup (C) dan gedung OPD Dinas Pemda Kota Payakumbuh dengan nilai kondisi kurang (K) maka untuk mengembalikan nilai kondisi gedung menjadi baik (B) ada beberapa komponen yang harus dilengkapi oleh pengelola gedung yaitu komponen kelengkapan tapak, sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif serta selanjutnya dapat membentuk manajemen proteksi kebakaran gedung.

5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman observasi peneliti dalam melakukan pengecekan kriteria pemeriksaan sistem keselamatan bangunan gedung menggunakan pedoman pemeriksaan keselamatan bangunan terhadap bahaya kebakaran (Pd-T-11-2005-C) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Departemen PU agar dapat mengklasifikasikan kriteria penilaian tiap sub komponen gedung sesuai dengan kelas bangunan/ fungsi bangunan agar mempermudah dalam penilaian sehingga penilaian dan hasil lebih akurat sesuai dengan kelas bangunan yang di audit. Kemudian untuk analisis data penentuan ekuivalensi kriteria kategori penilaian sebaiknya diklasifikasikan lebih detail seperti ekuivalensi penilaian untuk setiap sub komponen yang tidak tersedia.



